

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Anies Minta Bantuan di Ujung Masa Jabatan

Gambir, Warta Kota

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah merengek kepada pemerintah pusat agar membantunya dalam menangani banjir.

PDIP memandang, pemerintah pusat melalui kementerian telah banyak membantu pemerintah daerah dalam menangani dan menanggulangi banjir.

"Ini kan di ujung masa jabatannya dia merengek-renek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pada Senin (18/4).

"Padahal kemarin-kemarin, pemerintah pusat sudah menunggu mengalokasikan anggaran untuk program normalisasi dan kalau tidak salah sampai tiga kali alokasi APBD, tapi dimatikan (anggarnya) karena Pemprov DKI tidak kunjung membebaskan lahan," lanjutnya.

Menurut dia, selama kepemimpinannya Anies tidak pernah membebaskan lahan untuk program normalisasi Sungai Ciliwung demi menanggulangi banjir.

Hingga menjelang masa jabatannya berakhir pada 2022, Anies baru mulai mengeksekusi duit sekitar Rp 1,1 triliun untuk pembebasan lahan sungai memakai dana pemulihan eko-

nomi nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

"Pembebasan lahan nggak mudah, tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan karena pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total," kata Gembong yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Hal itu dikatakan Gembong untuk menanggapi pernyataan Anies yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk menangani kapasitas aliran sungai di berbagai kawasan sungai yang melewati lintas provinsi. (fat)